

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), dan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE TAHUN 2010-2016

Rina Ardiyanti, Eko Jokolelono dan Yunus Sading

Rinaardianty99@gmail.com

Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this research is to know whether the Regional Real Income, General Allocation Fund, simultaneously affect the Gross Regional Domestic Product of Central Sulawesi Propince in the period of 2010-2016 and the Regional Real Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocations Fund partially effect on Gross Regional Domestic Product of Central Sulawesi Propince 2010-2016 Period. The testing in this research was Multiple Linear Regression data panel with coefficient Determination, F test, and t for all data were processed by using Eviews 7.0. The result of F test shows the Regional Real Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund, simultaneously affect the Gross Regional Domestic Product. It shows a larger F-count $56.06551 > F$ - table of 0.05 where of the t test Result only Regional Real Income and the Specific Allocation Fund affecting the Gross Regional Bruto Product.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Regional Real Revenue, General Allocation Fund and Specific Allocation Fund*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Sistem hubungan pusat dan daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip yaitu Desentralisasi, Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (kuncoro, 2004 :18-19) . Otonomi daerah di masa orde baru hingga reformasi Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di revisi kembali menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Di berlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan

meningkatkan kinerja keuangan untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Apriana,2010). Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah yang perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan Keuangan pusat dan daerah akan ada pendekatan *interdisipliner* karena banyak disiplin ilmu lain berkaitan dengan hubungan dengan ini, misalnya administrasi negara, politik, hukum, ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang

nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota. (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 169).

Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta untuk suatu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru di daerah tersebut. Sumber daya yang ada di daerah tersebut akan di kelola secara bersamaan oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga bisa menghasilkan pencapaian

Halim (2004:20) mengemukakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang di kelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang termaksud dalam keuangan daerah yang di kelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di dasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pada asas desentralisasi pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah diberikan kekuasaan keuangan dalam rangka

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002:9).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Propinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Mulyani (2006) menyatakan bahwa DAU merupakan *instrument transfer* ke daerah yang berperang untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23, di jelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Halim (2014: 138-142) menjelaskan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar merupakan prioritas nasional.

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (propinsi) menggambarkan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah.

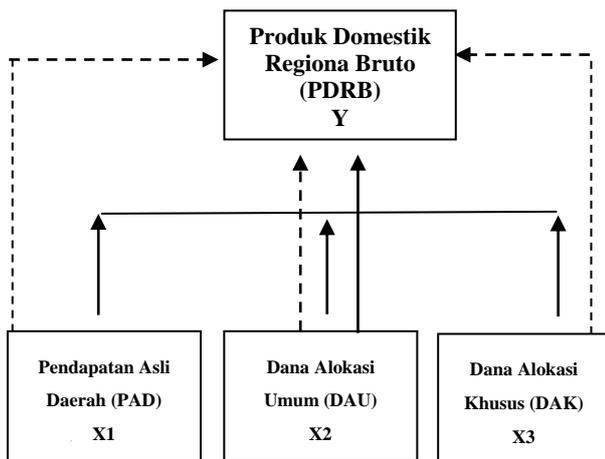
Produk Domestik Regional Bruto menurut badan Pusat statistik didefinisikan baik berupa atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah regional tertentu, atau jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atas dasar perhitungan yakni digunakan Tahun 2010.

Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016, menyatakan 17 sektor ekonomi dalam PDRB adalah (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, (2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, (3) Sektor Industri dan Pengelolaan, (4) Sektor Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang, (6) Sektor Bangunan, (7) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

:Reparasi Mobildan Sepeda Motor, (8) Sektor Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, (10) Informasi dan Konomikasi, (11) Jasa keuangan dan Asuransi, (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya.

Menurut Yeni (2015) Satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah meningkatnya PDRB yaitu meningkatnya *output* per kapita dalam jangka panjang. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiataanya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah Daerah diharap mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui :
(1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 -2016
(2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Tengah 2010-2016.



METODE

Berdasarkan permasalahan yang diangkat serta pertimbangan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive eksplorative*), adalah melalui gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, serta hubungan fenomena yang diteliti. Penggunaan tipe ini didasarkan atas pertimbangan ilmiah, yaitu sesuai dengan masalah yang di ajukan dalam penulisan, Nasir (2005:162). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto.

Sugiyono (2011:90) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sampel. Populasi dalam penelitian seluruhan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

Sugiyono (2011:91) Menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada Penelitian ini merupakan daerah yang memiliki kelengkapan APBD 2010-2016.

Tabel 1. Sampel

No	Nama Kab/Kota	Kriteria	Sampel
1.	Baangai Kepulauan	✓	Sampel 1
2	Banggai	✓	Sampel 2
3	Morowali	✓	Sampel 3
4	Poso	✓	Sampel 4
5	Donggala	✓	Sampel 5
6	Toli-Toli	✓	Sampel 6
7	Buol	✓	Sampel 7
8	Parigi Moutong	✓	Sampel 8
9	Tojo Una-Una	✓	Sampel 9
10	Sigi	✓	Sampel 10
11	Palu	✓	Sampel 11

Sumber : diolah sendiri

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 Kab dan 1 Kota, penelitian ini memiliki di mensi waktu 7 tahun, sehingga jumlah amatan berjumlah 11 Kabupaten/Kota 11 x 7 tahun = 77 observasi.

Berdasarkan Permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan, maka variabel-variabel yang akan menjadi obyek analisis dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua macam yaitu variabel terikat (*dependent variable*) yang di beri symbol Y dan X Variabel bebas (*independent varibel*) sebagai berikut :

1. Variabel Bebas yang meliputi :
 - Pendapatan Asli Daerah (X1)
 - Dana Alokasi Umum (X2)
 - Dana Alokasi Khusus (X3)
2. Variabel terikat terdiri dari :
 - Produk Domestik Regional Bruto (Y)
 Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah didefinisikan sebagai berikut.

Tabel 2 Oprasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X1) Propinsi Sulawesi Tengah	Pendapatan Asli Daerah Kota Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (APBD)	Rasio

2	Dana Alokasi Umum (X2) Propinsi Sulawesi Tengah	Dana Alokasi Umum Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (APBD)	Rasio
3	Dana Alokasi Khusus (X3) Propinsi Sulawesi Tengah	Dana Alokasi Khusus Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (APBD)	Rasio
4	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah (Y)	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016	Rasio

Sumber : (Data diolah)

Data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bersumber dari publikasi kantor pemerintahan seperti:

1. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Tadulako
2. Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah
3. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tengah.

Metode analisis data dengan menggunakan peralatan statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis Regresi Berganda dengan menggunakan Ordinary Least Squae (OLS) yang menggunakan data antara waktu (*cross section*) pada kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2016 dengan menggunakan program *Eviews 7.0*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik. Dengan menggunakan data *time series* selama 7 Tahun dan *cross section* sebanyak 11 kabupen/kota sehingga menghasilkan 77 observasi.

Adapun persamaan regresi berganda dalam bentuk data panel adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \epsilon$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

β_2 = Koefisien Regresi

β_3 = Koefisien Reresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

I = *Cross Section*

T = Waktu

e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Propinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±84 meter diatas permukaan Laut, terletak pada posisi dan 2° 22' Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan, serta 119° 22'-124° 22' Bujur Timur di lalului oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten dan 1 wilayah Kota dengan total luas 61.841,29 km² Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 Tahun 2016 luas dataran masing-masing kabupaten/kota berikut ini terdiri dari:

Tabel 3. Luas Wilayah dan Jarak Antara IbuKota Kabupaten / Kota dengan IbuKotaPropinsi Sulawesi Tengah, 2016

No	Kabupaten/Kota	Kabupaten Luas (km ²)	IbuKota	Jarak Ke	Keterangan
		Total Area	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	
1	Banggai Kepulauan	2,448,79 km ²	Salaka	607 + 46 Mil	Darat / Laut
2	Banggai	9,672,90 km ²	Luwuk	607	Darat
3	Morowali	3, 037,04 km ²	Bungku	518	Darat
4	Poso	7 112,25 km ²	Poso Kota	221	Darat
5	Donggala	4,275,08 km ²	Banawa	34	Darat
6	Toli-toli	4,079,77 km ²	Baolan	434	Darat
7	Buol	4,043, 57 km ²	Lipunoto	383	Darat
8	Parigi Moutong	5,089,91 km ²	Parigi	84	Darat
9	Toju Una-Una	5,721,15 km ²	Ampana	377	Darat
10	Sigi	5,196.02 km ²	Bora	30	Darat
11	Banggai Laut	725, 67 km ²	Banggai	607 + 94 Mil	Darat / Laut
12	Morowali Utara	10,004,28km ²	Kolonodale	431	Darat
13	Palu	395,06 km ²	Palu	0	

Sumber Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi tengah 2016

Kedaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 1964 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, terbentuklah Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu : Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi otonom berdiri sendiri yang disahkan Undang-Undang No 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964, dan berlaku surat 1 januari 1964. Berdasarkan Undang-Undang No 4 tanggal 12 Oktober 1994, terbentuklah Kotamadya Palu. Dalam era reformasi Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol,

Morowali dan Banggai Kepulauan. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2002 oleh pemerintah Pusat terbentuk lagi Kabupaten Parigi Moutong. Pada tanggal 21 Juli 2008 terbentuk Kabupaten Sigi berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2008 Oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2013 terbentuk 2 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara

Hasil Analisis Regresi Berganda Data Panel

Selanjutnya dilakukan analisis regresi Pooled Data dengan metode *Fixed Effect* Model, dengan Variabel bebas Pendapatan PAD, DAU, DAK dan PDRB.

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dapat disusun bentuk Persamaan regresi berikut :

$$Y = 4234340 + 0.026312 X_1 + -0.000820 X_2 + 0.0006508 X_3$$

Ringkasan hasil penelitian diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan

program *Eviews* 7.0 dapat dilihat dari tabe sebagai berikut.

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda Data Panel

No	Variabel	Koefisien Regresi	t-Hitung	Prob
1	Konstanta	4234340	5.909683	0.0000
2	PAD(X ₁)	0.026312	7.792680	0.0000
3	DAU (X ₂)	-0.000820	-0.485936	0.6287
4	DAK (X ₃)	0.006508	0.25997	0.0000

Koef Determinasi (R²) = 0.922363
 F-Hit = 5757.57446
 α = 0.05
 Adjusted R-squared = 0.906343 Prob. F = 0.000000

Sumber : Lampiran (Data diolah)

Dari Hasil regersi Data panel yang diatas,dapat dibuat suatu interprestasi statistik tentang perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan pada variabel independen.

1. Nilai koefesien konstanta sebesar 4234340. Memberikan arti tanpa adanya variabel independen, tingkat pertumbuhan PDRB adalah 4234340.
2. Nilai Koefesien X₁ adalah 0.026312 dengan probabilita t_{-hitung} 0.0000 ini berarti bila terjadi kenaikan 0,01 PAD akan diikuti dengan kanaikan PDRB 0.026312 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa adanya pengaruh positif variabel PAD terhadap PDRB.
3. Nilai Koefesien X₂ adalah -0.000820 dengan probabilita t_{-hitung} 0.6287 nilai probabilita t-hitung lebih besar dari tingkat signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak signifikan terhadap PDRB.
4. Nilai Koefesien X₃ adalah 0.006508 dengan nilai probabilita 0.0000 ini berarti bila terjadi kenaikan DAK 1% akan diikuti dengan kenaikan PDRB 0.006508.Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis adanya pengaruh positif dan sigifikan variabel DAK terhadap PDRB.

Uji Hipotesis

Uji F dimaksudkan untuk membuktikan Hipotesis Pertama yaitu“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah”

Kriteria : Ho tidak dapat ditolak bila

$$t_{-hitung} < F_{-tabel}$$

Ho dapat ditolak bila $F_{-hitung} >$

$$F_{-hitung}$$

Hasil regresi yang dilakukan diperoleh F_{-hitung} lebih besar 57.57446 > F_{-tabel} sebesar 0.05 atau 2.72 artinya Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel (PAD,DAU dan DAK) yang di uji secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PDRB) .

Uji t ini digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam persamaan regersi secara individu signifikan dalam memprediksi nilai variabel dependen. dengan tingkat signifikan 0,05, dan kriteria pengujian yaitu :

Kriteria : Ho diterima bila $t_{-hitung} < t_{-tabel}$

Ha diterima bila $t_{-hitung} > t_{-tabel}$

Tabel 4. Hasil Uji Signifikan dengan Uji t

Variabel	t-hitung	α. 0.05	Keputusan
X ₁	7.792680	1.664	Ha diterima
X ₂	-0.485938	1.664	Ho ditolak
X ₃	10.25997	1.664	Ha diterima

Hasil regersi diatas yang diperoleh bahwa t_{-hitung} variabel PAD (X₁) sebesar 7.792680 dan DAK (X₃) sebesar 10.25997 t_{-hitung} > t_{-tabel} sebesar 1.664 maka Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan Dana Alokasi Umum sebesar -0.485938< t_{-tabel} 1.664 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) maka H_0 di tolak. Dengan tingkat signifikan pada α 0.05.

Uji R^2 (R-squares)

Berdasarkan Pengujian dilakukan untuk mengetahui proporsi atau persentase variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh R-squares (R^2) sebesar 0.906343. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman nilai variabel dependen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel independen (PAD, DAU dan DAK) sebesar 91 persen sedangkan sisanya sebesar 9 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah secara Simultan

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

PDRB adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun artinya semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendapatkan PAD, DAU, dan DAK secara silmutan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah dapat diterima.

Hal ini menunjukkan PAD, DAU & DAK yang besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi PDRB di Kabupaten/Kota. Semakin tinggi tingkat PDRB akan mengakibatkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi modal swasta maupun daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Berbagai hasil penelitian dan kajian-kajian teori yang telah dikemukakan di atas telah menguatkan hasil penelitian ini, bahwa peran PAD, DAU, dan DAK sangat urgen dalam meningkatkan pertumbuhan daerah di Sulawesi Tengah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Tengah secara Parsial.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk PDRB. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah. ini sejalan dengan penelitian Idhamsyah, Afiyah, Ulfi dan Yeni Nur yang hasil penelitian ini mengacu terhadap PDRB. PDRB, menurut badan Pusat statistik didefinisikan baik berupa atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah regional tertentu, atau jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pembangunan ekonomi regional mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing, secara teori PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002:9). Menurut penulis Semakin meningkat kontribusi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD sah, maka PAD mengalami peningkatan disebabkan indikator nilai PDRB

Hal ini menunjukkan PAD memberikan pengaruh positif terhadap PDRB, karena PAD merupakan salah satu sumber pembelajaan daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggalai potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk dapat mendorong peningkatan kemampuan pendapatan daerah. Sebagai ukuran derajat desentralisasi. Pengelolaan Pendapatan asli daerah mampu meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan perkembangan perekonomian yang berkeadilan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Pendapatan Asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus terus menerus dipacu terhadap pertumbuhan. Dalam otonomi kamdirian daerah pemerintah daerah sangat dituntut dalam pebiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Arsyad (2010) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pertumbuhan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja, yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan baru. Dalam Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu,

pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada) harus dapat menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang membangun perekonomian daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta untuk suatu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru di daerah tersebut. Sumber daya yang ada di daerah tersebut akan di kelola secara bersamaan oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga bisa menghasilkan pencapaian.

Pengaruh Dana Aloksi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran desentralisasi.

Berdasarkan hasil penelitian DAU berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0.6287 lebih kecil dari tingkat yang di gunakan dalam Penelitian ini sebesar 0.05 atau 1.664 dan nilai t_{hitung} - 0.485936. Data penelitian ini menggunakan lebih banyak kabupaten/kota dan runtut waktu selama tujuh tahun (data panel) dengan lokasi seluruh Sulawesi Tengah. Ini menandakan bahwasanya PDRB tidak akan pernah lepas dari peranan pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan dengan instrument kebijakan publik dan fiskal. Campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan ekonomi terutama dalam menjaga pemerataan pembangunan. Setiap daerah mempunyai kemampuan tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Dana Alokasi Umum kurang memiliki pengaruh yang nyata terhadap PDRB. Dapat di simpulkan bahwa lebih banyak belanja pegawai dari pada belanja modal. Berbeda dengan Penelitian Idhamsyah (2011) bahwa Penelitian DAU di berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2005-2009, dengan Penelitian Ulfi (2010), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2007.

Mulyani (2006) Menyatakan Bahwa DAU merupakan instrument transfer ke daerah yang berperang untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Pengaruh Dana Aloasi Khusus Terhadap Proudruk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk PDRB. Hal ini disebabkan karena nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Yang berarti tidak boleh disalah gunakan untuk kegiatan diluar, ketentuan bahwa dana transfer APBN ke APBD yang secara khusus diarahkan untuk mendanai kegiatan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional secara signifikan telah mendorong Produk Domestik Regional Bruto untuk penyediaan berbagai infrastruktur publik seperti sarana dan prasarana masing-masing daerah atau Masing-masing Kabupaten.

Halim (2014: 138-142) menjelaskan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar merupakan prioritas nasional seperti sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Inrastruktur
4. Bidang Infrastruktur Irigasi
5. Bidang Infrastruktur Air Minum
6. Bidang Infrastruktur Sanitasi
7. Bidang Pertanian
8. Bidang kelautan dan Perikanan
9. Bidang Prasarana Pemerintah
10. Bidang Lingkungan Hidup
11. Bidang Perdagangan

Friska Sihite (2012) menyatakan DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu untuk membiayai investasi dan infrastruktur yang dalam jangka panjang akan meningkatkan PDRB suatu daerah.

Temuan dari hasil Penelitian Abimanyu (2005) yang mengemukakan bahwa pembangunan layanan publik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti infrastruktur dan saran prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara efektif dan akan meningkatkan produktovitas yang pada akhirnya akan pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula

Hal ini sejalan dengan penelitian Idhamsyah, maryati dan yeni nur yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil regresi berganda data panel yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PAD,

DAU, DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2016.

2. Hasil regresi berganda data panel secara parsial PAD berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2010-2016.
3. Hasil regersi berganda data panel secara parsial bahwa DAU berpengaruh positif, tapi tidak signifikan terhadap Produk PDRB Propinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2010-2016.
4. Hasil regersi berganda data panel dilakukan dan disimpulkan secara parsial bahwa Dana DAK berpangaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2010-2016.

Saran

Disarankan kepada mahasiswa berikutnya, perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang lebih luas maupun variabel lain yang dianggap berpengaruh atau berkaitan dengan PDRB. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang dihasilkan secara maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dapat terselesaikan pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ketua Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Bapak Mohamad Ichwan yang penuh kesabaran mengarahkan dan memberi petunjuk selama dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abimanyu (2005). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah : Studi Empirik di Wilayah

Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI. Vol.08, No 2, pp. 416-424

Afiyah Nurul Siti. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan laju Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto tahun 1998-2008 menggunakan program Minitab 14. STMIK Asia Malang

Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi., (2010),"Analisis Hubungan Antara Belanja Modal,Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*,Vol. XI No. 1, Januari

Arsyad, Lincolin (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi bke-5, Penerbit STIM YKPN Yogyakarta

Batakusumah, D dan Solihin (2002). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

BPS Statistik Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016

BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

BPS Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2016

BPS Statistik Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

BPS Statistik Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

Friska Sihite (2012). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Perumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatra Utara. Tesis S2 Program Pascasarjan Universitas Sumatra utara. Tidak dipublikasikan.

Halim, Abdul (2004). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- Halim, Abdul (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Idhamsyah (2011). *Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2009*. Tesis S2 Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi
- Mulyani, Budi, Subkhan dan Slamet, K. (2006). *Keuangan Daerah, Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP Badan Diklat Keuangan
- Nasir, Muh (2005). *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung, ISBN 979-8433-0205`
- Ulfi dan Endrawati (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5 halaman 68-64
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Yeni Nur'aeni dan Suratno (2015). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol 2, No. 1, Juni 2015, hal 32-42* ISSN 2339-1545.